

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Hendra. 1987. Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (Kumpulan Esai untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo). Gramedia. Jakarta.
- Fanggidae, Frits dan Ronal Fanggidae. 2016. Dampak Implementasi Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat. Web. 3 Maret 2018. <http://www.jurnalinovkebijakan.com/index.php/kebijakan/article/download/1>.
- Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Pers. Jakarta.
- Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 112D/KEP/HK/2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Kupang Nomor 15A/KEP/HK/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Akuntansi Dana Bergulir. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga. Jakarta.
- Mulyati, Etty. 2016. Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia) Refika Aditama. Bandung.
- Nange, Nidya Marrischa. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kelurahan Penkase Oeleta Kota Kupang Provinsi NTT. Kupang: Skripsi Kearsipan Fakultas Ekonomi, Unwira.
- Pendidikan Ekonomi. Desember, 2012. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- Web. Diakses 8 Maret 2018. <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html>.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemekaran Wilayah Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang

pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementrian/Lembaga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sumampow, Yovince Yohana. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kelurahan Maulafa Kota Kupang Provinsi NTT. Kupang: Skripsi Kearsipan Fakultas Ekonomi, Unwira.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.